

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan harus dilakukan secara efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, yang seluruhnya dituangkan dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan, salah satunya melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran. LRA memberikan gambaran nyata tentang seberapa jauh pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam kegiatan riil. Oleh karena itu, analisis terhadap LRA, khususnya pada aspek belanja, menjadi penting untuk menilai efektivitas

pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang memiliki peran strategis dalam mengelola serta mengawasi pelaksanaan anggaran belanja daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD menjalankan fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Selain menyusun laporan keuangan, BPKAD juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran telah sejalan dengan tujuan serta prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam praktiknya, realisasi anggaran belanja sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan, baik karena kendala administratif, teknis, maupun faktor eksternal lainnya. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap laporan realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Padang menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk periode anggaran selanjutnya. Untuk menunjang laporan realisasi anggaran yang baik maka perlu dilaksanakan suatu pengukuran atas pencapaian kinerja instansi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan penelitian dalam pengambilan kebijakan. Sehubungan dengan latar belakang dari masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik “Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut judul tersebut, penulis tertarik ingin membahas masalah yang berkaitan dengan pencairan dana hibah yaitu :

1. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tahun anggaran 2022-2024 menggunakan analisis rasio Efisiensi?
2. Apakah penggunaan anggaran belanja selama tahun 2022- 2024 telah efisien ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis rasio efisiensi realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Untuk menganalisis apakah penggunaan anggaran belanja selama tahun 2022-2024 telah efisien.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dicermati. Di penelitian lapangan bersifat deskriptif. Data yang digunakan akurat didukung dengan studi kepustakaan (*Literary Research*).

2. Data Sekunder

Diperoleh dengan membaca buku, Jurnal, website yang berkaitan dengan yang dibahas dan mendokumentasikan file-file, arsip-arsip, catatan dan hal-hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Studi Pustaka

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait dan mengunjungi website yang dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang didalamnya terdapat sub – bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan, serta tujuan dilakukan magang, waktu pelaksanaan, dan sistematikanya dalam penyusunan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang sehubungan dengan anggaran pemerintah meliputi perihal mencakup tentang anggaran, jenis-jenisnya dan lain sebagainya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penulisan tujuan pustaka dilengkapi dengan sumber penulisannya.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan profil BPKAD Kota Padang, visi dan misi BPKAD

Kota Padang, tugas dan fungsi BPKAD Kota Padang

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai penelitian yang sedang dibahas .

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi Kesimpulan dari penelitian dan saran yang dianggap perlu untuk perbaikan berikut.

